

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Kalikajar.

a. Program dan Kegiatan

Anggaran yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017 adalah sebesar **Rp 15.442.226.370,.** Proporsi anggaran belanja untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah 0,77% dari total belanja APBD Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 yang berjumlah Rp 2.000.613.704.761,-. Sedangkan realisasi anggarannya adalah sebesar **Rp 14.771.215.640,-** atau 95,65% dari rencana. Adapun program dan alokasi anggaran urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.4.1
Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
A	Belanja Langsung	11.512.945.000	11.274.629.339	97,93
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.024.895.000	1.006.194.878	98,18
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	190.050.000	186.067.786	97,90
3	Program peningkatan disiplin aparatur	115.000.000	114.180.000	99,29
4	Program Pengembangan Perumahan	1.080.000.000	935.594.750	86,63
5	Program Lingkungan Sehat Perumahan	9.103.000.000	9.032.591.925	99,23
B	Belanja Tidak Langsung	3.929.281.370	3.496.586.301	88,99
	Jumlah Total	14.112.281.370	13.464.772.976	95,65

Sumber : APBD Kabupaten Wonosobo, 2017

b. Realisasi Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas dan pelayanan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diampu. Anggaran untuk program ini dimanfaatkan untuk kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan alat tulis kantor,

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyediaan jasa kebersihan dan keamanan dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan mencakup kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala mebeleur dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dimanfaatkan untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

4) Program Pengembangan Perumahan

Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung pengembangan perumahan di Kabupaten Wonosobo serta mempercepat penanganan permukiman kumuh khususnya di lokasi perumahan dan permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 653/247/2014. Program Pengembangan Perumahan dijabarkan dalam kegiatan Fasilitasi Kegiatan Perumahan dan Permukiman, Penataan Lingkungan Kelurahan (pajak rokok) serta Fasilitasi Kegiatan Kotaku.

Untuk Fasilitasi Kegiatan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan secara swakelola untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsolidasi terkait dengan bidang perumahan dan permukiman. Sedangkan kegiatan Penataan Lingkungan Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Sambek, Mlipak, Jaraksari dan Wonosobo Barat, dibagi menjadi empat paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kotaku merupakan pendamping dari Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digulirkan Pemerintah Pusat.

5) Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program lingkungan sehat perumahan dilaksanakan untuk menunjang sasaran pokok pencapaian indikator peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) dijabarkan dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu kegiatan Peningkatan Akses Air Limbah Setempat Kab. Wonosobo (pajak rokok) dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK), serta kegiatan Fasilitasi Jambanisasi Desa yang dilaksanakan di Kecamatan Kalikajar.

III.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2017 upaya peningkatan akses sanitasi khususnya air limbah rumah tangga dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK) di 10 lokasi yang tersebar di Kelurahan Kalibebek, Kalianget, Wonosobo Timur, Wonosobo Barat, Sambek, Jaraksari dan Kejiwan. Masing-masing menerima anggaran sebesar Rp 375.535.000,00 dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh KSM (Kelompok Sanitasi Masyarakat), dengan output berupa pembangunan 10 (sepuluh) tangki septic komunal yang dapat melayani 680 KK dengan jumlah 2.730 jiwa di lingkungan tersebut.

Untuk menunjang pencapaian *universal access*, Kabupaten Wonosobo juga mengalokasikan kegiatan Peningkatan Akses Air Limbah Setempat sebesar Rp 5.000.000.000,00. Kegiatan tersebut berupa pembangunan tangki septic individu yang dilaksanakan oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 10.000.000,00 yang menghasilkan output berupa pembangunan 500 unit tangki septic individu.

c. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel III.B.4.2
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Tahun 2017 Berdasarkan Indikator EKPPD

No.	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Rumah tangga pengguna air bersih	86,67%	86,71%	88,82%
2	Lingkungan permukiman kumuh	0,796%	0,788%	0,759%
3	Rumah layak huni	88,50%	75,33%	76,12%

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, 2018

Tabel III.B.4.3
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2017

No.	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Realisasi Capaian 2016	Target 2017	Realisasi Capaian 2017	% Realisasi Capaian 2017	Status Capaian
1	Rasio Rumah Layak huni	0,753	0,895	0,761	85,03	↓
2	Kekurangan tempat tinggal (<i>backlog</i>) berdasarkan perspektif menghuni	37.608	32.816	21.575	152,10	○
3	Cakupan rumah layak huni terjangkau	3,81%	5,00%	3,96%	79,20	↓
4	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1,358	1,000	1,342	134,20	○
5	Persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana	0%	2,00%	2,73%	136,50	○

Sumber: Dinperkimhub, DPUPR, BPBD, DPMPST, 2017

Keterangan Status Capaian :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ○ | Tercapai | Realisasi capaian sudah $\geq 100\%$ |
| → | Tidak tercapai | Realisasi capaian 90% - 99% |
| ↓ | Tidak tercapai dan perlu upaya keras | Realisasi capaian $\leq 90\%$ |

Capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2017 secara umum mengalami peningkatan. Pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani. Capaian rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Wonosobo selalu didorong untuk dapat ditingkatkan. Untuk wilayah perkotaan dan sekitarnya penyediaan air bersih dilaksanakan oleh PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo. Melalui Program Hibah Air Minum Perkotaan APBN 2017 dapat mendanai 2.000 SR baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga PDAM secara keseluruhan mencatat peningkatan jumlah pelanggan/ sambungan rumah dari 81.999 SR di tahun 2016 menjadi 87.596 SR pada tahun 2017. Pemenuhan air bersih juga dilakukan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.161.695.200,00 serta kegiatan Pembangunan Sistem Air Minum Pedesaan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 984.489.000,00. Selain itu ditopang dengan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh layanan PDAM. Pada tahun 2017 program PAMSIMAS mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.770.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan di 6 (enam) kecamatan dengan sasaran sebanyak 12 (dua belas) desa yaitu di Kecamatan Kalikajar (Desa Butuh, Simbang, Kembaran, Tegalombo, Lamuk dan Rejosari), Kecamatan Kertek (Desa

Candiyanan), Kecamatan Kepil (Desa Kagungan dan Tegalgot), Kecamatan Kejajar (Desa Jogogan), Kecamatan Garung (Desa Maron) serta Kecamatan Mojotengah (Desa Derongisor) sebagai penerima kegiatan. Kolaborasi kegiatan-kegiatan penyediaan air bersih tersebut mampu melayani sejumlah 212.303 KK yang sehingga capaian Rumah tangga pengguna air bersih meningkat menjadi 88,82% atau naik 2,11% dari capaian tahun 2016.

Pada tahun 2017 melalui kegiatan Bantuan Dana Intensif (BDI) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dialokasikan anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 dari APBN, yang dilaksanakan di Kelurahan Jaraksari. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga mengalokasikan dana melalui APBD sebesar Rp. 800.000.000,00 untuk kegiatan Penataan Lingkungan Kelurahan di empat lokasi di wilayah Kelurahan Sambek, Mlipak, Jaraksari dan Wonosobo Barat. Kolaborasi kegiatan-kegiatan tersebut dapat menurunkan luas lingkungan permukiman kumuh menjadi 61,988 Ha atau turun 23.768 m² dari tahun 2016 sehingga capaian lingkungan permukiman kumuh menjadi 0,759% atau turun 0,029% dari capaian tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 melakukan upaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui kolaborasi berbagai macam program. Seperti dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang memberikan bantuan sebesar Rp 4.325.500.000,00 dengan rincian untuk rumah tidak layak huni dengan kategori rusak ringan menerima Rp 7,5 juta, kategori rusak sedang menerima Rp 10 juta dan kategori rusak berat menerima Rp 15 juta. Diikuti bantuan dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan untuk membantu 768 KK dengan total anggaran sebesar Rp 7.680.000.000,00 dimana masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 10 juta. Sedangkan dari APBD Kabupaten Wonosobo mengalokasikan bantuan untuk 338 KK dengan anggaran sebesar Rp 4.910.000.000,00 dengan rincian masing-masing menerima Rp 10 juta. Selain itu ditopang dengan partisipasi dari sumber anggaran lainnya, misalnya CSR, Dana Desa dan lain sebagainya. Dari program-program tersebut, berkontribusi menurunkan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.883 rumah, sehingga jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2017 berkurang menjadi 55.403 rumah. Data tersebut menjadi faktor pengurang bagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 yaitu sebanyak 231.996 rumah dan mendapatkan data jumlah rumah layak huni sebanyak 176.593 rumah. Sehingga dapat diketahui capaian rumah layak huni tahun 2017 adalah sebesar 76,12%.

Rasio rumah layak huni mengalami peningkatan dari capaian tahun 2016 sebesar 0,753 menjadi 0,761 di tahun 2017, akan tetapi masih di bawah target capaian sebesar 0,895. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak rumah tinggal tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Wonosobo yang belum tertangani.

Capaian kinerja kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif penghuni untuk tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 21.575. Hal ini disebabkan *data base* untuk dasar perhitungan *backlog* ini mengalami perubahan, dengan mengoreksi jumlah Kepala Keluarga (KK) yang pada tahun sebelumnya masih

menggunakan data proyeksi pertumbuhan KK menjadi data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) berdasarkan aplikasi nasional. Sedangkan data jumlah rumah keseluruhan juga berubah dari tahun sebelumnya yang menggunakan proyeksi pertumbuhan rumah hasil dokumen RP3KP tahun 2011 menjadi data proyeksi pertumbuhan jumlah rumah berdasarkan perhitungan data citra satelit. Penggunaan data citra satelit dengan resolusi tinggi dari BIG (Badan Informasi Geospasial) ini merupakan upaya untuk memperoleh data yang lebih detail dan akurat. Namun demikian kedepannya perlu dibangun **sistem informasi perumahan** yang salah satunya memuat data rumah *by name by address* di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, sehingga perhitungan capaian kinerja kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif penghuni untuk tahun-tahun berikutnya semakin valid.

Untuk capaian cakupan rumah layak huni terjangkau mengalami kenaikan dari 3,81% di tahun 2016 menjadi 3,96% pada tahun 2017, yang mana masih di bawah target sebesar 5%. Hal ini menggambarkan masih rendahnya penambahan jumlah rumah di Kabupaten Wonosobo.

Sedangkan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk mengalami penurunan dari capaian tahun 2016 sebesar 1,358 menjadi 1,342 di tahun 2017, hal ini terjadi karena jumlah tempat pemakaman umum tidak mengalami tidak penambahan sedangkan jumlah penduduk selalu bertambah.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sampai dengan tahun 2017 tercatat sejumlah 366 rumah terkena bencana. Pada tahun 2017 berhasil ditangani sejumlah 10 rumah, sehingga persentase rumah yang diperbaiki akibat bencana sebesar 2,73%.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Tabel III.B.4.4
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

No	Indikator	Jumlah
1	Tingkat Pendidikan	
	a. S-2	5
	b. S-1	6
	c. DI-DIV	6
	d. SMA	18
	e. SMP	4
	f. SD	6
	Jumlah	45
2	Golongan	
	a. Golongan IV	5
	b. Golongan III	14
	c. Golongan II	18

III.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Jumlah
	d. Golongan I	8
	e. Tenaga Kontrak	-
	f. THL/GTT/PTT	-
	Jumlah	45
3	Pejabat/Struktural	
	a. Esselon II	-
	b. Esselon III	2
	c. Esselon IV	4
	Staf/Fungsional Umum	39
	Jumlah	45

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Kab. Wonosobo, 2017

e. Kondisi Sarana dan Prasarana

Tabel III.B.4.5
Kondisi Sarana dan Prasarana
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
	ASET TETAP	79.710.120.987,05
01	Tanah	11.393.000.000,00
02	Peralatan dan Mesin	6.694.472.915,20
	Alat-alat Besar	45.482.478,00
	Alat-alat Angkutan	3.204.596.453,35
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.780.523,00
	Alat Pertanian	0,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	742.828.956,85
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	85.063.504,00
	Alat-alat Kedokteran	0,00
	Alat Laboratorium	2.585.721.000,00
	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	0,00
	Gedung dan Bangunan	53.451.486.627,85
	Bangunan Gedung	28.375.930.459,00
	Monumen	25.075.556.168,85
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.171.161.444,00
	Jalan dan Jembatan	594.359.489,00
	Bangunan Air/Irigasi	0,00
	Instalasi	0,00
	Jaringan	7.576.801.955,00
05	Aset Tetap Lainnya	0,00
	Buku dan Perpustakaan	0,00
	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
	Aset Renovasi	0,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	ASET LAINNYA	0,00

III.B.4. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
07	Aset Lainnya	0,00
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
	Aset Tidak Berwujud	0,00

Sumber : BPPKAD Kab. Wonosobo, 2017

f. Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dalam Tabel Matrik Permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel III.B.4.6
Matriks Permasalahan dan Solusi
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan	Solusi
1. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan sanitasi	Dilakukan sosialisasi masalah PHBS dan Kesehatan Lingkungan kepada masyarakat secara berjenjang dengan integrasi berbagai sektor. Penanganan masalah sanitasi dilakukan melalui program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan menjadi tumpuan peningkatan capaian kinerja khususnya yang terkait dengan sanitasi. Diperlukan percepatan dan penyebar- luasan program ini melalui dukungan sumber daya, baik berupa pendanaan maupun peran aktif berbagai <i>stakeholder</i> untuk bersama pemerintah melaksana-kan program tersebut
2. Terbatasnya dana pembangunan sanitasi	Dengan terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan sanitasi, maka perlu dilakukan pentahapan prioritas penanganan. Tahap awal pengentasan masalah sanitasi diprioritaskan di wilayah perkotaan yang mempunyai kepadatan tinggi. Pengembangan sanitasi lingkungan berskala komunitas (IPAL Komunal) sangat tepat dilakukan di wilayah perkotaan

III.B.4. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan	Solusi
	dan diintegrasikan dengan program lain.
3. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi IPAL Komunal	Minimnya lahan yang tersedia di permukiman khususnya wilayah perkotaan dapat disiasati dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong milik individu maupun umum serta jalan-jalan lingkungan yang telah disepakati bersama oleh warga.
4. Tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH)	Penanganan masalah rumah tidak layak huni, telah dilakukan beberapa upaya diantaranya integrasi berbagai program termasuk melibatkan CSR dan dana non APBN/APBD. Diharapkan kedepannya keterlibatan berbagai pihak tersebut dapat ditingkatkan lagi.
5. Sulitnya mendapatkan data di bidang perumahan khususnya data jumlah rumah dengan tingkat keakuratannya yang tinggi	Perlunya dibangun sistem informasi perumahan yang salah satunya memuat secara detail data kepemilikan rumah di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo, yang diintegrasikan dengan sistem pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (DPMPST) untuk segala proses perizinannya, termasuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Rendahnya kepemilikan rumah	Penanganan langsung pada sasaran melalui upaya peningkatan akses kredit kepemilikan rumah, dimana pemerintah berperan sebagai fasilitator dan penjamin pelaksanaan program ini. Kerja sama dengan perbankan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh.